

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	PIUWAN RAIJYAT	10	2-8-2002

Atas Penjarahan Pasir di Riau Selama 20 Tahun

Singapura Patut Diadukan ke Mahkamah Int

JAKARTA, (PR).-

Ketua MPR, HM Amien Rais mengatakan, penjarahan pasir Indonesia oleh kapal-kapal keruk dari berbagai perusahaan asing yang terjadi di Riau Kepulauan sudah berlangsung 20 tahun belakangan ini. Praktek penjarahan itu sudah sangat memprihatinkan dan memilukan karena kejadiannya berlangsung tanpa dapat dihentikan.

Hal itu dikemukakan, Amien Rais menanggapi laporan kunjungan kerja Tim Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (31/7).

Sebagai diberitakan, Komisi I DPR yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Riau meminta pemerintah mencabut Keputusan Presiden (Keppres) No 33 Tahun 2002 tentang pengerukan dan penjualan pasir laut. Alasannya, Keppres itu telah menimbulkan dilema bagi aparat di lapang-

an untuk memberantas penyelundupan pasir laut yang terbukti berdampak serius bagi kerusakan lingkungan laut dan kehidupan para nelayan.

Anggota DPR dari Komisi I, Abdul Wahid Aziz Bisri setuju ditertibkannya pengerukan pasir dan bahkan diminta untuk dihentikan sama sekali. Kerusakan yang ditimbulkan pengerukan pasir tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga terhadap tatanan kehidupan masyarakat dan nelayan di sekitar lokasi pengerukan.

Amien Rais yang dihubungi wartawan usai pelantikan enam anggota MPR pergantian ahtar waktu (PAW) itu lebih lanjut mengatakan, Singapura membeli pasir Indonesia itu tentu dengan harga yang sangat murah, karena pada hakekatnya kapal-kapal keruk itu sudah mencuri kekayaan alam Indonesia. Kare-

na itu sesungguhnya Indonesia bisa menuntut ke Mahkamah Internasional atas penjarahan kekayaan negara yang telah berlangsung sejak sangat lama itu walaupun sebagian kesalahan ada di pihak Indonesia.

Sementara itu, kata Amien, Singapura jangan-jangan dalam proses penjarahan pasir yang panjang itu telah melakukan 'crime of omission' yaitu semacam kejahatan dengan membiarkan berlangsungnya penjarahan pasir, kemudian dibeli oleh pihak Singapura.

Sudah saatnya sekarang ini Pemerintah Daerah di Riau dan Pemda seputar Kepulauan Riau yang sesungguhnya tiap malam hari melihat *tanker* (alat berat, red) mencuri pasir kita itu segera bersama-sama pemerintah pusat, Angkatan Laut serta Polri, sesegera mungkin menghentikan penjarahan pasir itu. Apa yang

telah diputuskan oleh pemerintah pusat pada waktu yang lalu hendaknya dijadikan pegangan yang teguh. Kalau betul sekarang ada enam atau tujuh kapal keruk yang sudah ditangkap jangan pernah dilepaskan, tapi diusut sampai tuntas agar supaya ini menjadi preseden yang bagus bahwa Indonesia tidak bisa lagi dikadalin perusahaan-perusahaan asing itu yang membuat Indonesia sebagai koloninya di daerah-daerah jajahannya.

Menjawab pertanyaan, soal surat fotocopi yang ditunjukkan oleh awak kapal yang ditangkap, Amien mengatakan, jika sekarang terjadi kolusi antara baik antara aparat pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan para penjarah pasir itu tentu patut diangkat ke pengadilan nasional dan kalau perlu ke Mahkamah (Pengadilan) Internasional. (A-109)***